

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT, karena dengan Taufik dan Hidayah-nya jualah kami telah berhasil menyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Akhir Tahun Anggaran 2023 dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan.

LPPD ini dimaksudkan sebagai bahan laporan yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat yang memuat capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelaksanaan tugas pembantuan selama 1 (satu) tahun anggaran.

LKPJ ini dimaksudkan sebagai bahan masukan untuk pembuatan laporan yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang memuat hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menyangkut pertanggungjawaban kinerja yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran. LPPD dan LKPJ ini memuat visi, misi prioritas dan sasaran pelaksanaan kegiatan, alokasi dan realisasi anggaran dari masing-masing kegiatan, hasil yang telah dicapai serta permasalahan yang dihadapi dan upaya pemecahannya.

Kami berharap, laporan ini dapat memberikan informasi yang diperlukan sekaligus juga sebagai bahan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan kegiatan program yang menjadi tugas pokok dan fungsi SKPD dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan umumnya pada tahun-tahun berikutnya.

Kami menyadari bahwa masih banyak kekurangan baik dalam pelaksanaan program maupun dalam penyusunan laporan ini, untuk itu kami mengharapkan adanya kritik dan saran yang sifatnya membangun untuk kebaikan dan kemajuan dalam pelaksanaan program kedepan, dan kepada semua pihak yang sudah membantu dalam penyusunan laporan ini diucapkan terima kasih.

Banjarbaru, Januari 2025

Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Kalimantan Selatan,

ENDRI, AP, M. AP

Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP 19750821 199412 1 005

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH.....	1
1.1 Capaian Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output).....	1
1.2 Capaian Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome).....	2
1.3 Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan.....	2
1.4 Kebijakan Strategis yang Dilaksanakan	6
1.4.1 Isu Strategis Organisasi	6
1.4.2 Tujuan dan Sasaran Renja Tahun 2023.....	11
BAB II CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN (DEKONSENTRASI)	31
2.1 Dasar Hukum Pelaksanaan Tugas Pembantuan	31
2.2 Instansi Pemberi Tugas Pembantuan	31
2.3 Realisasi Program dan Kegiatan Beserta Anggaran	31
2.4 Permasalahan dan Kendala.....	33
2.5 Saran dan Tindak Lanjut	33
BAB III CAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL.....	34
3.1 Jenis Pelayanan Dasar	34
3.2 Alokasi dan Realisasi Anggaran	34
3.3 Dukungan Personil	37
3.5 Permasalahan dan Solusi	39
BAB IV TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD.....	40
BAB V PENUTUP	41
BAB VI LAMPIRAN	42

DAFTAR TABEL

Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output).....	1
Indikator Kinerja Kunci Hasil (OUTCOME)	2
Permasalahan Pelayanan SKPD dan Pendorong	8
Kondisi, Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan Program dan Kegiatan.....	12
Indikator dan Target Capaian Kinerja	13
Indikator Kinerja Kinerja Daerah	14
Sasaran Strategis dan Indikator	14
Indikator, Kinerja, Target dan Realisasi 2023 & 2024	15
Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat	16
Capaian Kinerja DPMPTSP	16
Indikator Kinerja Sesuai RPJMD dan Renstra	18
Rekapitulasi Indikator Kinerja Utama.....	24
Realisasi Belanja DEKON Tahun Anggaran 2024.....	32
Realisasi Belanja APBN (DAK) Tahun Anggaran 2024.....	33
Realisasi Anggaran DPMPTSP Tahun Anggaran 2024.....	34
Komposisi Pegawai Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan	38
Komposisi Pegawai Berdasarkan Pangkat Golongan	38
Komposisi Pegawai Berdasarkan Jabatan Struktural dan Fungsional.....	39

BAB I

CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

1.1 Capaian Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)

Berdasarkan dari IKK Provinsi Permendagri No. 18 Tahun 2020 Tentang Indikator Kinerja Kunci keluaran (Output) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu terdiri dari :

No	IKK OUTPUT	Jenis Data	Capaian Kinerja	Keterangan / Data Dukung yang dibutuhkan
Urusan Penanaman Modal				
1	PERDA mengenai pemberian fasilitasi/intensif penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah provinsi	Peraturan Daerah Tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi	- draft	Daftar terlampir
2	Standar operasional prosedur pelaksanaan pemberian fasilitasi/insentif penanaman modal	✓ Draft SOP Insentif Kemudahan Pemberian Fasilitas/insentif	- draft	
3	Laporan evaluasi pelaksanaan pemberian fasilitasi/insentif penanaman modal		Tidak Ada Kegiatan	
4	Kegiatan seminar bisnis, forum, one on one meeting	Terlaksananya kegiatan seminar bisnis, forum, one on one meeting	2 Kali	Daftar kegiatan terlampir
5	Kegiatan pameran penanaman modal	Terlaksananya kegiatan pameran penanaman modal	3 Kali	Daftar kegiatan terlampir
6	Kegiatan penerimaan misi penanaman modal		Tidak Ada Kegiatan	
7	Konsultasi perizinan dan non perizinan penanaman modal	Tersedianya sarana dan prasarana konsultasi dan pegaduan ; terlaksananya pelayanan perizinan dan non perizinan penanaman modal	✓ Secara tatap muka 91 kali ✓ Secara online 4 kali	Bukti terlampir
8	Penerbitan perizinan dan non perizinan penanaman modal	Perizinan Penanaman modal digantikan dengan perizinan Berusaha: ✓ NIB ✓ Perizinan sesuai kewenangan provinsi	Jumlah Penerbitan : NIB: 186.673 Perizinan: 393 Izin	Data terlampir
9	Laporan realisasi penanaman modal	Tersedia pers rilis investasi Kalimantan selatan Januari - September tahun 2024 Total : Rp. 18,134T	1 laporan	Data terlampir

No	IKK OUTPUT	Jenis Data	Capaian Kinerja	Keterangan / Data Dukung yang dibutuhkan
10	Pembinaan aparatur penanaman modal tingkat provinsi serta kabupaten/kota	Terlaksananya Bimtek penanaman modal kepada aparatur dan penanaman modal di provinsi kalimantan selatan	2 Kali	Data terlampir
11	Pembinaan penanaman modal PMA dan PMDN	Terlaksananya pembinaan penanaman modal PMA dan PMDN	7 Kali	Data terlampir
12	Tersedianya data dan informasi dan non perizinan provinsi	Tersedia pada website, dan Simapan, Bekantan	2 media	Bukti terlampir

1.2 Capaian Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)

Indikator Kinerja Kunci keluaran (Outcome) terdiri dari :

No	IKK OUTCOME	Jenis Data	Capaian Kinerja	Keterangan / Data Dukung yang dibutuhkan
1	Persentase peningkatan investasi di provinsi	(Jumlah investasi tahun n- jumlah investasi tahun n-1) di provinsi	24.85T – 19.7T	FC Daftar rincian realisasi PMDN tahun 2023 dan 2024 pada ditandatangani oleh pejabat yang berwenang
		Jumlah investasi tahun n-1 di provinsi	19.7T	

1.3 Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan

DPMPTSP Provinsi Kalimantan Selatan pada Tahun Anggaran 2024 melaksanakan sebanyak 7 (tujuh) program pembangunan yang terdiri dari 1 (satu) program rutin (kesekretariatan) dan 6 (enam) program Urusan Penanaman Modal sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi;
2. Program Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal;
3. Program Pengendalian Penanaman Modal;
4. Program Promosi Penanaman Modal;
5. Program Perizinan Ekonomi dan Sumber Daya Alam;
6. Program Perizinan Infrastruktur dan Sosial; dan
7. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal

Adapun Program dan kegiatan DPMPTSP Provinsi Kalimantan Selatan untuk tahun anggaran 2024 telah dilaksanakan sesuai dengan program dan kegiatan seperti yang telah direncanakan. Namun untuk mengetahui sampai sejauh mana program dan kegiatan tersebut dilaksanakan perlu dilakukan evaluasi kinerja. Pada tahun anggaran 2024, DPMPTSP Prov.Kalsel

melaksanakan 7 (tujuh) Program yang terdiri dari 13 (tiga belas) kegiatan serta 36 (tiga puluh enam) sub kegiatan. Adapun Tingkat pencapaian program dan kegiatan DPMPTSP Provinsi Kalimantan Selatan Tahun anggaran 2024 sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

Realisasi pelaksanaan Program dan Kegiatan Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Kalimantan Selatan selama kurun waktu Tahun Anggaran 2024 sebesar 85.72% dengan uraian kegiatan sebagai berikut :

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (fisik) sebesar 100,00%, dengan sub. Kegiatan :
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (fisik) 100,00%
 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (fisik) 100,00%
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (fisik) sebesar 100,00% dengan sub. Kegiatan:
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (fisik) 100,00%
 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (fisik) 100,00%
 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 100,00%
3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah sebesar 100,00% dengan sub. Kegiatan:
 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi (fisik) 100,00%
 - Sosialisasi Peraturan Perundang – Undangan (fisik) 100,00%
 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang – Undangan (fisik) 100,00%
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah (fisik) sebesar 100,00% dengan sub. Kegiatan:
 - Penyediaan Komponen Instansi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (fisik) 100,00%
 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (fisik) 100,00%
 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor (fisik) 100,00%
 - Penyediaan Bahan Cetak dan Pengadaan (fisik) 100,00%
 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan (fisik) 100,00%
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (fisik) 100,00%

5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (fisik) sebesar 100% dengan sub. Kegiatan:
 - Pengadaan Mebel (fisik) 100,00%
 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya (fisik) 100,00%
6. Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (fisik) sebesar 100,00% dengan sub. Kegiatan:
 - Penyedia Jasa Surat Menyurat (fisik) 100,00%
 - Penyedia Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (fisik) 100,00%
 - Penyedia Jasa Pelayanan Umum Kantor (fisik) 100,00%
7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (fisik) sebesar 100,00% dengan sub. Kegiatan:
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (fisik) 100,00%
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (fisik) 100,00%
 - Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (fisik) 100,00%

2. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal

Realisasi pelaksanaan Program dan Kegiatan Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Kalimantan Selatan selama kurun waktu Tahun Anggaran 2024 sebesar 88.18% dengan uraian kegiatan sebagai berikut :

1. Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif di Bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi (fisik) sebesar 100,00%, dengan sub kegiatan:
 - Penetapan Kebijakan Daerah Dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal (fisik) 100,00%
 - Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal (fisik) 100,00%
2. Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi Provinsi (fisik) sebesar 100,00%, dengan sub kegiatan:
 - Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi (fisik) 100,00%
 - Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Provinsi (fisik) 100,00%

3. Program Promosi Penanaman Modal

Realisasi pelaksanaan Program dan Kegiatan Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Kalimantan Selatan selama kurun waktu Tahun Anggaran 2024 sebesar 96,46% dengan uraian kegiatan sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi (fisik) sebesar 100,00%, dengan sub kegiatan:
 - Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Promosi (fisik) 100,00%
 - Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi (fisik) 100,00%.

4. Program Pelayanan Penanaman Modal

Realisasi pelaksanaan Program dan Kegiatan Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Kalimantan Selatan selama kurun waktu Tahun Anggaran 2024 sebesar 86,81% dengan uraian kegiatan sebagai berikut :

1. Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Menjadi Kewenangan Provinsi (fisik) sebesar 100,00%, dengan sub kegiatan:
 - Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (fisik) 100,00%.
 - Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal (fisik) 100,00%.
 - Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan (fisik) 100,00%.
 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah (fisik) 100,00%.

5. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Realisasi pelaksanaan Program dan Kegiatan Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Kalimantan Selatan selama kurun waktu Tahun Anggaran 2024 sebesar 83,79% dengan uraian kegiatan sebagai berikut :

1. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi (fisik) sebesar 100,00%, dengan sub kegiatan:
 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal (fisik) 100,00%.
 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal (fisik) 100,00%.

- Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal (fisik) 100,00%.

6. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal

Realisasi pelaksanaan Program dan Kegiatan Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Kalimantan Selatan selama kurun waktu Tahun Anggaran 2024 sebesar 90,40% dengan uraian kegiatan sebagai berikut :

1. Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi(fisik) sebesar 100,00% , dengan sub. Kegiatan:
 - Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (fisik) 100,00%.

1.4 Kebijakan Strategis Yang Dilaksanakan

1.4.1 Isu Strategis Organisasi

Ditinjau dari tugas dan fungsinya, maka permasalahan yang masih menjadi tantangan dalam operasional Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan, terdiri dari unsur pelayanan dan investasi. Perlu dilakukan suatu analisis terhadap permasalahan-permasalahan serta isu-isu strategis.

Gambaran isu dan kondisi yang ada sebagai berikut:

- ✓ Kondisi perekonomian global, mengalami perlambatan ekonomi
- ✓ Investasi di kalsel masih relative menarik dan potensial untuk dikembangkan
- ✓ Kalsel sebagai Gerbang Ibukota Negara
- ✓ Hilirisasi Industri
- ✓ Pelaksanaan Pelayanan Publik terkait Perizinan dan Nonperizinan

Adapun beberapa permasalahan umum yakni :

1. Peningkatan kinerja penanaman modal untuk menarik investor ke Kalimantan Selatan, melalui :
 - A. Analisis dan penelitian tentang kondisi dan permasalahan-permasalahan yang dihadapi investor apabila ingin berinvestasi di Kalimantan Selatan
 - B. Mengkoordinasi permasalahan-permasalahan investasi diatas, untuk diclearkan, atau minimal dikurangi

- C. Meningkatkan sinergi pemangku kepentingan dalam upaya peningkatan investasi di Kalimantan Selatan
 - D. Membuat rencana tindak peningkatan investasi di Kalimantan Selatan.
2. Peningkatan kinerja pelayanan untuk kemudahan perizinan dan kualitas yang lebih baik.

Melalui Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan, perumusan isu strategis tersebut dilakukan identifikasi permasalahan berdasarkan tugas pokok serta fungsi dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan mempunyai tugas mengordinasi pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan perizinan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu, sedangkan fungsi dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan antara lain adalah sebagai perumusan kebijakan teknis penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan Pemerintah Daerah yaitu melaksanakan koordinasi dan menyelenggarakan pelayanan administrasi di bidang Perizinan dan Nonperizinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, keamanan, dan kepastian dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya, dari tugas dan fungsi tersebut, maka permasalahan yang masih menjadi tantangan dalam operasional Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan dapat diidentifikasi sebagai berikut:

- 1) Belum seluruh daerah di Provinsi Kalimantan Selatan menyusun RUPM;
- 2) Masih sedikit identifikasi data potensi daerah;
- 3) Sinkronisasi perencanaan dan kebijakan penanaman modal;
- 4) Belum optimalnya promosi investasi;
- 5) Ketidakmerataan penanaman modal;

- 6) Masih kurangnya kesadaran perusahaan akan kewajibannya menyampaikan LKPM;
- 7) Data PMA/PMDN tidak sinkron antara Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- 8) Menuju pelayanan prima;
- 9) Terbatasnya sumber daya manusia;
- 10) Sarana dan prasarana belum optimal;
- 11) Sistem informasi pelayanan belum optimal;
- 12) Keterbatasan Anggaran.

Tabel Permasalahan Pelayanan SKPD dan Pendorong

Permasalahan Pelayanan SKPD	Pendorong
- Belum optimalnya promosi investasi - Belum teridentifikasinya data potensi daerah - Ketidakmerataan penanaman modal - Pelayanan belum optimal - Masih kurangnya kesadaran perusahaan akan kewajibannya menyampaikan LKPM. - Data PMA/PMDN tidak sinkron antara pusat, provinsi dan kab/kota - Sinkronisasi Perencanaan - Belum seluruh daerah di Provinsi Kalimantan Selatan menyusun RUPM;	- Kejelasan visi jangka panjang Kalimantan Selatan - Ketersediaan lahan dan komoditi unggulan - Kondusifnya situasi sosial masyarakat dan keamanan - Wilayah bebas dan ancaman gempa bumi dan letusan gunung merapi - Kesiapan kelembagaan penanaman modal - Kesiapan aparatur pemerintah yang berkomitmen

Penentuan Isu-isu Strategis

Dari berbagai identifikasi masalah dan hasil telaahan diatas, maka isu strategis dalam penyelenggaraan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan lima tahun ke depan adalah:

1. Belum optimalnya investasi di Kalimantan Selatan; dan
2. Belum optimalnya pelayanan perizinan dan nonperizinan

1.4.2 Tujuan dan Sasaran Renja Tahun 2024

A. Rencana Strategis

Perumusan visi dan misi RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021-2026 merupakan salah satu tahap penting dalam penyusunan Rencana Strategis SKPD sebagai hasil dari analisis sebelumnya. Visi menjelaskan arah atau suatu kondisi ideal dimasa depan yang ingin dicapai (clarity of direction) berdasarkan kondisi dan situasi yang terjadi

saat ini yang menciptakan kesenjangan (gap) antara kondisi saat ini dan masa depan yang ingin dicapai. Pernyataan visi yang artikulatif akan memberikan arah yang jelas bagaimana mencapai masa depan yang diharapkan dan mengatasi kesenjangan yang terjadi. Sedangkan Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan dan diwujudkan agar tujuan dapat terlaksana dan berhasil dengan baik sesuai dengan visi yang telah ditetapkan.

Bahwa Visi dan Misi setiap SKPD di lingkup Provinsi Kalimantan Selatan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dimana Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan, berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan, dibangun melalui proses refleksi dan proyeksi yang digali dari nilai-nilai luhur yang dianut oleh seluruh komponen stakeholder. Visi RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021-2026 adalah :

“KALSEL MAJU (Kalimantan Selatan Makmur, Sejahtera dan Berkelanjutan) SEBAGAI GERBANG IBUKOTA NEGARA”

Misi RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021-2026 :

1. Membangun Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berbudi Pekerti Luhur
2. Mendorong Pertumbuhan Ekonomi yang Merata
3. Memperkuat Sarana Prasarana Dasar dan Perekonomian
4. Tata Kelola Pemerintahan yang lebih Fokus pada Pelayanan Publik
5. Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup dan Memperkuat Ketahanan Bencana

B. Tujuan dan Sasaran SKPD

Dalam menentukan tujuan dan sasaran SKPD harus mengacu pada Visi dan Misi RPJMD. Penetapan tujuan dan sasaran perlu mempertimbangkan kompetensi yang dimiliki segenap sumber daya dalam organisasi. Seluruh sumber daya dalam organisasi harus mempunyai kompetensi daya saing tinggi untuk mencapai tujuan.

Sebagai salah satu komponen dari perencanaan strategis, tujuan yang dirumuskan merupakan gambaran tentang keadaan yang diinginkan oleh SKPD selama kurun waktu lima tahun ke depan, berdasarkan tugas pokok dan fungsinya, serta sebagai upaya mendukung pencapaian

Pembangunan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan seperti yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2021-2026. Tujuan dan sasaran ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi sehingga rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai dimasa mendatang. Untuk itu tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih dari setiap misi.

Adapun Tujuan dan Sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan sesuai RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan 2021-2026 mengacu pada Misi II dan Misi IV.

Adapun keterkaitan visi, misi, tujuan, dan sasaran digambarkan sebagai berikut:



Kondisi, Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan Program dan Kegiatan

KONDISI AWAL DAN ISU	TUJUAN, SASARAN, STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM /KEGIATAN
Kondisi 1) Kondisi perekonomian global, berdampak pada harga komoditi ekspor kalsel, mengalami perlambatan ekonomi yaitu dari 5,35% (2013) menjadi 4,85% (2014), titik terendah pada 3,84% (2015) 2.) Investasi di kalsel tahun 2014 mengalami penurunan, terutama di sektor tambang 3) Daya tarik investasi di sektor tersebut juga mengalami perlambatan Isu 1) Belum optimalnya investasi di Kalsel 2) Belum optimalnya pelayanan perizinan dan nonperizinan	Tujuan • Meningkatkan Laju Pertumbuhan Ekonomi • Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Sasaran • Meningkatnya Investasi yang Berdampak ke Daerah • Meningkatnya Pelayanan Publik Strategi • Pengembangan Iklim Penanaman Modal • Peningkatan Promosi Penanaman Modal • Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal • Peningkatan Pelayanan Penanaman Modal • Peningkatan Pengelolaan Data dan Sistem Informasi	• Peningkatan Pemberian Fasilitas di Bidang Penanaman Modal • Peningkatan Promosi Penanaman Modal • Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal • Peningkatan Pelayanan Penanaman Modal • Peningkatan Pengelolaan Data dan Sistem Informasi	1. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal :: a) Penetapan Pemberian Fasilitas /Intensif dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi b) Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi 2. Program Promosi Penanaman Modal a) Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Provinsi 3. Program Pelayanan Penanaman Modal b) Penanaman Modal yang Ruang Lingkupnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota 4. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal A. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Provinsi 5. Program Pengelolaan Data dan Sistem informasi Penanaman Modal B. Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi

C. Sasaran RPJMD

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kalimantan Selatan nomor 2 tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2021-2026, Sasaran utama penanaman modal yang ingin dicapai pada tahun 2026 yakni peningkatan investasi dan nilai IKM. kemudian ditetapkan 5 (lima) program prioritas urusan penanaman modal beserta Indikator dan targetnya sebagai berikut:

Program Prioritas	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Akhir
				2021		2022		2023		2024		2025		2026		
				Target	(Juta. Rp)	Target	(Juta. Rp)	Target	(Juta. Rp)	Target	(Juta. Rp)	Target	(Juta. Rp)	Target	(Juta. Rp)	
Urusan Penanaman Modal																
Peningkatan Iklim Investasi dan realisasi Investasi	Realisasi Investasi PMA dan PMDN	Rp	7.76 T	12.715 T	1.640	11.66 T	1.968	12.55T	2.362	13.52 T	2.834	14.55 T	3.401	15.67T	4.082	15.67T
Peningkatan Kualitas dan Kemudahan Pelayanan Perizinan	Indeks kepuasan masyarakat (IKM)	Indeks	A (88.35)	A 88)	350	A (88.25)	1.500	A (88.50)	1.861	A (88.75)	1.952	A (89)	2.343	A (89.25)	2.821	A 89.25)

Selanjutnya ditetapkan juga indikator kinerja daerah pada urusan penanaman modal sebagai berikut:

Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD	Target Capaian					Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD (2026)
			2022	2023	2024	2025	2026	
Realisasi Investasi PMA dan PMDN	Triliun Rp	12.715	11.66	12.55	13.52	14.55	15.67	15.67

Target realisasi investasi PMA dan PMDN adalah sebesar Rp13.52 triliun. Selain itu juga ditargetkan indeks kepuasan masyarakat (IKM) dengan predikat A (nilai 88.75).

D. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran kinerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Kalimantan Selatan ditentukan oleh seberapa jauh tingkat capaian dari masing-masing indikator kinerja yang telah ditetapkan. Hasil pengukuran tersebut diklasifikasikan berdasarkan kategori capaian kinerja dengan rentang capaian sebagai berikut:

- ✓ Lebih dari 90% untuk kategori capaian Sangat Memuaskan;
- ✓ 80% s/d 90% untuk kategori capaian Memuaskan;
- ✓ 70% s/d 80% untuk kategori capaian Sangat Baik;
- ✓ 60% s/d 70% untuk kategori capaian Baik;
- ✓ Diatas 50% s/d 60% untuk ketegori capaian Cukup;
- ✓ Kurang dari 50% untuk kategori capaian Kurang;

Sasaran strategis dan indikator Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Kalimantan Selatan yang telah direncanakan adalah sebagai berikut :

Sasaran Strategis : • Meningkatnya Investasi yang Berdampak ke Daerah • Meningkatnya Pelayanan Publik	Peningkatan Investasi dengan indikator : 1. Realisasi Investasi PMA dan PMDN (Rp)
	Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan dengan indikator : 2. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Terdapat 1 (satu) sasaran strategis pada DPMPTSP Provinsi Kalimantan Selatan dengan 2 (dua) indikator didalamnya, dimana salah satunya menjadi indikator kinerja daerah sesuai dengan RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan 2021-2026.

Dalam perencanaan program kerja tahun 2024, Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Kalimantan Selatan secara keseluruhan telah menetapkan kelompok indikator kinerja kegiatan. Kelompok indikator input terdiri dari besarnya dana yang digunakan untuk membiayai suatu kegiatan dihitung dengan satuan rupiah. Sedangkan indikator output merupakan hasil yang langsung diperoleh ketika kegiatan selesai dilaksanakan, jenisnya bervariasi tergantung pada jenis kegiatannya.

Indikator outcome merupakan indikator yang terbentuk karena adanya output, yang bisa berupa pemanfaatan output yang dapat diukur dalam jangka pendek (intermediate outcome). Untuk menilai atau mengukur capaian kinerja, menggunakan tolok ukur indikator sasaran yang melekat pada kegiatan.

Kinerja Utama pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Kalimantan Selatan yaitu Peningkatan Investasi dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan dengan 2 (dua) indikator yakni: Realisasi Investasi PMA dan PMDN dan Indeks kepuasan Masyarakat (IKM). Realisasi investasi PMA dan PMDN dengan capaian sampai dengan Triwulan IV tahun 2024 sebesar 24,85T atau 183.80% masuk dalam klarifikasi Memuaskan. Sedangkan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dengan capaian 94.25 atau 106.19% juga masuk dalam klarifikasi sangat memuaskan.

Indikator Kinerja, Target, dan Realisasi 2023 & 2024

No	Indikator Kinerja	Target 2023 (sesuai RPJMD dan Renstra)	Realisasi 2023 dan % capaian	Target 2024 (sesuai RPJMD dan Renstra)	Realisasi 2024 dan % capaian
1	Realisasi Investasi PMA dan PMDN	12.550.000.000.000 TW. IV	19.762.000.000.000 (157.46%)	13.520.000.000.000 TW.IV	24.850.710.277.905 (183.80%)
2	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	A (88.50)	A (94.25) 106.50%	A (88.75)	A (94.25) 106.19%

Penjelasan

Indikator indeks kepuasan masyarakat (IKM) tahun 2023 dengan nilai A (88.50) dengan predikat A sesuai Permenpan RB nomor 14 Tahun 2017. Sedangkan Tahun 2024 dengan nilai A (88.75). Adapun unsur penilaian sebagai berikut:

➤ Persyaratan ➤ Prosedur ➤ Waktu pelayanan ➤ Biaya/tarif ➤ Produk Layanan	➤ Kompetensi Pelaksana ➤ Perilaku pelaksana ➤ Sarana dan prasarana ➤ Penanganan pengaduan dan masyarakat
---	---

Analisa capaian kinerja berdasarkan sasaran strategis dan indikator kinerja yang telah ditetapkan dimana Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi

Kalimantan Selatan menetapkan 1 (satu) sasaran strategis dengan 2 (dua) kinerja utama dan 2 (dua) indikator dengan target yang akan dicapai setiap tahunnya. Untuk mencapai sasaran dan indikator kinerja tersebut dilaksanakan dalam bentuk program dan kegiatan. Adapun capaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2024 adalah sebagai berikut:

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN	CARA MENGHITUNG INDIKATOR KINERJA	SUMBER DATA
1	Peningkatan Investasi	Realisasi Investasi PMA dan PMDN (Rp)	13.520.000.000.000	24.850.710.277.905 (TW. IV) Tahun 2024	183.80%	Angka realisasi investasi yang terdiri dari PMA dan PMDN dijumlahkan dalam satuan Rupiah (Rp) dalam kurun waktu 1 (satu) tahun. Adapun realisasi investasi didapat dari Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) setiap perusahaan. LKPM dibuat setiap triwulan, sehingga dapat terlihat perkembangan reliasasi pelaksanaan investasinya. TW. IV	Dinas PM dan PTSP Prov Kalsel, BKPM RI
2	Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	A (88.75)	A (94.25)	106.19%	Analisis Survey Kepuasan Masyarakat	Dinas PM dan PTSP
Rata-rata Capaian					144.99%		

Penjelasan :

Pada Kinerja Peningkatan Investasi dengan indikator Realisasi Investasi PMA dan PMDN, tahun 2024 ditargetkan sebesar 13.52 triliun rupiah. Adapun realisasinya dari Januari – Desember 2024 sebesar **24,85 triliun rupiah** sehingga capaian kinerja sebesar **183.80%**.

Rumus indikator realisasi investasi PMA dan PMDN yaitu Angka realisasi investasi yang terdiri dari PMA dan PMDN dijumlahkan dalam satuan Rupiah (Rp) dalam kurun waktu 1 (satu) tahun. Adapun realisasi investasi didapat dari Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) setiap perusahaan. LKPM dibuat setiap triwulan, sehingga dapat terlihat perkembangan reliasasi pelaksanaan investasinya.

Pada Kinerja kedua yakni Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) ditargetkan

A dengan nilai 88.75. Adapun realisasinya adalah **A dengan nilai 94.25**, sehingga kinerja mencapai **106.19%**.

Indeks Kepuasan masyarakat (IKM) dilakukan dengan melaksanakan analisis survey kepuasan masyarakat (SKM) dengan langkah sebagai berikut:

- Menyediakan kotak saran, ruang pengaduan dan kuesioner survey Kepuasan Masyarakat;
- Diselesaikannya aduan/keluhan masyarakat terkait pelayanan perizinan;
- Pembagian kuisisioner kepada pelanggan.

Indikator kinerja sesuai RPJMD dan Renstra

INDIKATOR KINERJA	KONDISI AWAL	2021			2022			2023			2024			2025			2026		
		TARGET	REAL	CAPAIAN	TARGET	REAL	CAPAIAN	TARGET	REAL	CAPAIAN	TARGET	REAL	CAPAIAN	TARGET	REAL	CAPAIAN	TARGET	REAL	CAPAIAN
TARGET RPJMD KALSEL (RENSTRA DPMPSTP PROV. KALSEL):																			
Realisasi Investasi (Rp.Triliun)	7.76	10.83	12.71	117.41%	11.66	10.66	91.42%	12.55	19.76	157.46%	13.52	24.85	183.80%	14.55	-	-	15.67	-	-
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	A (88.35)	B (85)	A (88)	TERCAPAI	A (88.25)	A (88.75)	TERCAPAI	A (88.50)	A (94.25)	TERCAPAI	A (88.75)	A (94.25)	TERCAPAI	A (89)	-	-	A (89.25)	-	-

Pada indikator Realisasi Investasi PMA dan PMDN tahun 2024 ditargetkan sebesar **13.52 triliun rupiah**. Adapun realisasinya sampai pada **Triwulan IV** (Januari – Desember) sebesar **24.85 triliun rupiah**, sehingga kinerja mencapai **183.80%**.

Pada indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) ditargetkan A dengan nilai 88.50. Adapun realisasinya adalah A dengan nilai 94.25, sehingga kinerja mencapai 106.19%.

Indikator DPMPTSP (DPMPTSP) Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2023 sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021-2026 pada urusan penanaman modal yakni: Realisasi Investasi dengan target **24.85** triliun rupiah.

Capaian realisasi investasi pada tahun 2024 sebesar **24.85** triliun rupiah atau **183.80%** sampai pada **Triwulan IV** (Januari – Desember). Realisasi investasi telah tercapai masuk kedalam klasifikasi sangat memuaskan dengan target yang telah ditetapkan. Disisi lain juga rencana investasi atau sering disebut juga dengan minat investasi (berdasarkan persetujuan/Izin prinsip/tanda daftar) mengalami peningkatan yang signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa perkembangan iklim investasi khususnya di Kalimantan Selatan semakin diminati dan bertumbuh kembang. Dengan kata lain Investor berminat untuk menanamkan modalnya di Kalimantan Selatan.

Indeks Kepuasan masyarakat (IKM) dilakukan dengan melaksanakan analisis survey kepuasan masyarakat (SKM) dengan langkah sebagai berikut:

- Menyediakan kotak saran, ruang pengaduan dan kuesioner survey Kepuasan Masyarakat;
 - ✓ Melalui Tatap Muka
 - ✓ Melalui SKM Online
- Diselesaikannya aduan/keluhan masyarakat terkait pelayanan perizinan Pembagian kuesioner kepada pelanggan Analisis Peningkatan dan Penurunan Kinerja

Pada tahun 2024, target yang telah ditetapkan diperkirakan akan tercapai. Hal ini dikarenakan situasi yang sudah tercapai.

Upaya selanjutnya untuk pencapaian target **Realisasi** Investasi sebagai berikut :

1. Pengawasan Berkelanjutan kepada PMA & PMDN, didukung dengan APBD dan Dekonsentrasi APBN
2. Himbauan dan edaran pelaporan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)
3. Fasilitasi kepada perusahaan yang bermasalah atau mengalami kesulitan baik dalam pelaksanaan usahanya sampai dengan pelaporan kegiatannya yang berupa LKPM
4. Selalu berkoordinasi dengan Pemerintah pusat (BKPM RI) dan Pemerintah Kabupaten/Kota melalui DPMPTSP Kabupaten/Kota se Kalimantan Selatan
5. Promosi Investasi yang berkelanjutan, antara lain : pameran investasi, forum investasi, one-one meeting, dan lainnya.
6. Matchmaking dalam rangka kemitraan dunia usaha.
7. Penyusunan dokumen, kajian, serta kebijakan untuk peningkatan investasi
8. Inovasi SEJADI (Seberkas Jadi Dua Izin), agar izin yang semula tidak masuk skema penanaman modal menjadi masuk dari bagian penghitungan investasi, sehingga dapat memacu peningkatan realisasi investasi.
9. Gerai pelayanan perizinan di daerah dalam rangka memudahkan masyarakat dalam hal pelayanan perizinan.
10. Perbaikan iklim investasi melalui sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik (OSS).
11. Penyederhanaan perizinan (pengurangan waktu, syarat, dan prosedur)
12. Peningkatan Standar Pelayanan dengan implementasi SMM ISO 9001:2015.

Indikator Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2024 sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021-2026 pada urusan penanaman modal yakni: Realisasi Investasi dengan target 24.85 triliun rupiah, sasaran RPJMD sama dengan capaian kinerja eselon II.

Capaian realisasi investasi pada TW IV (Januari – Desember) tahun 2024 sebesar 24.85 triliun rupiah dari target tahun 2024 sebesar 13.52 Trilyun. Realisasi investasi mengalami penurunan.

Disisi lain, kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang telah diberikan menunjukkan perbaikan. Hal ini dapat dilihat dari Indikator pengukur kepuasan masyarakat yakni Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) tahun 2024 sebesar 94.25 dengan predikat A, sedangkan tahun 2024 A 88.75 sesuai Permenpan RB nomor 14 Tahun 2017.

Upaya yang dilakukan untuk peningkatan kualitas pelayanan perizinan dan nonperizinan:

1. Penyesuaian persyaratan, spesifikasi, dan biaya/tarif yang mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku.
2. Pendelegasian seluruh kewenangan perizinan dan nonperizinan lingkup pemerintah provinsi kepada DPMPTSP Prov.Kalsel sebanyak 7 bidang dan 145 jenis perizinan dan nonperizinan.
3. Pengelompokkan prosedural pengurusan perizinan dan nonperizinan menjadi 3 (tiga) Standar Operasional Prosedur (SOP): 1. Dengan pertimbangan teknis tanpa peninjauan lapangan, 2. Tanpa pertimbangan teknis dengan peninjauan lapangan, dan 3. Tanpa pertimbangan teknis tanpa peninjauan lapangan. Prosedural yang dibuat adalah untuk kemudahan dan kenyamanan masyarakat dalam berurusan. Telah dilakukan pemangkasan proses untuk menciptakan kemudahan berusaha bagi masyarakat.
4. Konsistensi implementasi maklumat pelayanan yang menyatakan bahwa aparat menyelenggarakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan publik, dan apabila tidak ditepati, siap menerima sanksi yang berlaku.
5. Reward petugas pelayanan terbaik
6. Penyediaan dan Penambahan tenaga Front Officer
7. Tersedianya Help Desk
8. Implementasi perizinan secara online dengan Sistem Aplikasi Perizinan Online (SIMAPAN) dan Online Single Submission (OSS)
9. Digital Signature untuk percepatan dan kemudahan perizinan nonperizinan.

10. Pembentukan Satuan Petugas Percepatan Pelaksanaan Berusaha Provinsi Kalimantan Selatan serta keaktifan didalamnya
11. Implementasi ISO 9001:2015

E. Program dan Kegiatan Penunjang Kinerja

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta prioritas pembangunan, Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2024 yang mendukung pencapaian indikator kinerja daerah urusan penanaman modal adalah sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, dengan Kegiatan dan Sub Kegiatan:
 - A. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 2. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - B. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
 3. Koordinasi dan Pelaksanaan Akutansi SKPD
 - C. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 1. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
 2. Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan
 3. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
 - D. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

- E. Pengadaan Barang Milik Daerah
 - 1. Pengadaan Mebel
 - 2. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- F. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - 3. Penyediaan Jasa Umum Pelayanan Kantor
- G. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - 2. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
 - 3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- 2. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal, dengan Kegiatan dan Sub Kegiatan:
 - A. Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan daerah Provinsi
 - 1. Penetapan Kebijakan Daerah Dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan kemudahan Penanaman Moda
 - 2. Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal
 - B. Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi
 - 1. Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi
 - 2. Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Provinsi
- 3. Program Promosi Penanaman Modal, dengan kegiatan dan Sub Kegiatan:
 - A. Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi
 - 1. Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi
 - 2. Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi

4. Program Pelayanan Penanaman Modal, dengan kegiatan dan Sub Kegiatan:
 - A. Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
 1. Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
 2. Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal
 3. Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan
 4. Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah
 5. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, dengan kegiatan dan Sub Kegiatan:
 - B. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi
 1. Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal
 2. Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal
 3. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal
5. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal, dengan kegiatan dan Sub Kegiatan:
 - A. Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi
 1. Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

F. Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

Rekapitulasi penetapan indikator kinerja utama

NO	Nama Jabatan	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN	CARA MENGHITUNG INDIKATOR KINERJA
1	Kepala Dinas	Peningkatan Investasi	Realisasi Investasi PMA dan PMDN (Rp)	13,52 Trilyun Rupiah	24.85 Trilyun Rupiah Data Triwulan IV Januari - Desember	183.80%	Angka realisasi investasi yang terdiri dari PMA dan PMDN dijumlahkan dalam satuan Rupiah (Rp) dalam kurun waktu 1 (satu) tahun. Adapun realisasi investasi didapat dari Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) setiap perusahaan. LKPM dibuat setiap triwulan, sehingga dapat terlihat perkembangan realisasi pelaksanaan investasinya. TRIWULAN IV
		Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	A (88.75)	A (94,25)	106,19%	Analisis Survey Kepuasan Masyarakat
2	Sekretaris	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja SKPD	Nilai SAKIP DPMPTSP	A (83)	A (84.25)	101,51%	Persentase Nilai SAKIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			Persentase Penyerapan Anggaran SKPD	85%	88.74%	104,40%	Persentase Kenaikan Nilai Komponen Pelaporan pada LKIP
			Persentase Aset yang tercatat	100%	100%	100%	Persentase Pemenuhan sarana dan prasarana yang dibutuhkan SOPD
		Meningkatnya Pelayanan Sarana Prasarana dan Administrasi Perkantoran Kepegawaian	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana yang dibutuhkan SKPD	80%	80%	100%	Persentase pemenuhan pengurusan administrasi kepegawaian PNS SKPD Persentase Peserta Pelatihan/Bimtek yang paham
			Persentase Pemenuhan Administrasi Perkantoran dan Kepegawaian	100%	100%	100%	Persentase Aset yang tercatat (harus 100%) Persentase serapan anggaran SOPD
		Peningkatan Kualitas SDM SKPD	Persentase Peserta Pelatihan/Bimtek yang paham	100%	100%	100%	Persentase Peserta Pelatihan/Bimtek yang paham

NO	Nama Jabatan	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN	CARA MENGHITUNG INDIKATOR KINERJA
3	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Perkantoran dan Kepegawaian	Persentase Surat Menyurat, Surat Keluar dan Arsip yang dikelola	100%	100%	100%	Jumlah dokumentasi pelayanan surat menyurat
			Persentase Urusan Pemenuhan Rumah Tangga	100%	100%	100%	Jumlah Dokumen terkait administrasi kepegawaian
			Persentase Pemenuhan Bahan Analisa dan Evaluasi Organisasi dan Ketatalaksanaan	100%	100%	100%	Jumlah Pegawai yang Administrasi Kepegawaiannya dilayani secara tertib
		Tersedianya Sarana dan Prasarana sesuai Kebutuhan SKPD	Persentase Pegawai yang Administrasi Kepegawaiannya dilayani secara Tertib	100%	100%	100%	Jumlah Pegawai yang Administrasi Kepegawaiannya dilayani secara tertib
			Jumlah Dokumentasi Penyediaan Sarana dan Prasarana	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	Jumlah Peserta Pelatihan / Bimtek yang paham
		Tersedianya Dokumen Kebutuhan Diklat	Jumlah Dokumen Kebutuhan Diklat	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	Jumlah Dokumen Kebutuhan Diklat
4	Kasubbag Perencanaan, Keuangan dan Aset	Tersedianya Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD	Nilai Komponen Perencanaan pada LKIP DPMPTSP	28	25,39	90,68%	Nilai komponen pelaporan pada LKIP SKPD
			Nilai Komponen Pelaporan pada LKIP DPMPTSP	14	12,69	90,64%	Nilai komponen perencanaan pada LKIP SKPD
			Jumlah Dokumen Kinerja sesuai Ketentuan	6 Dokumen	6 Dokumen	100%	Jumlah dokumen kinerja sesuai ketentuan
		Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan secara berkala	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	Jumlah dokumen laporan keuangan secara berkala
		Terlaksananya Pengelolaan Aset SKPD	Persentase Aset yang dikelola	100%	100%	100%	Jumlah Aset yang dikelola
5	Kabid Perencanaan dan pengembangan Iklim Penanaman Modal	Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase Realisasi pelaksanaan Kemitraan	100%	100%	100%	Jumlah Realisasi Pelaksanaan Kemitraan dibagi Jumlah Kemitraan Dunia Usaha x 100%
			Persentase Potensi Investasi dipromosikan	100%	100%	100%	Jumlah Potensi Investasi daerah yang dapat dipromosikan dibagi Jumlah Potensi Investasi di 13

NO	Nama Jabatan	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN	CARA MENGHITUNG INDIKATOR KINERJA
			Persentase Potensi Investasi yang berbasis Lingkungan	20%	20%	100%	Kab/Kota x 100%
		Pengembangan Perencanaan dan Deregulasi Penanaman Modal	Jumlah Dokumen Potensi Investasi Daerah yang teridentifikasi Berbasis Lingkungan	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	Jumlah jenis Potensi Investasi Daerah yang teridentifikasi Berbasis Lingkungan
			Persentase Kesesuaian RUPM dengan Sektor Investasi	100 %	100 %	100 %	Jumlah Realisasi Sektor Investasi dibagi Jumlah sektor Investasi pada RUPM x 100%
		Pengembangan Pemberdayaan Usaha	Jumlah Kemitraan dunia usaha	4 Kemitraan	4 Kemitraan	100%	Jumlah Kemitraan dunia usaha
6	Kabid Promosi Penanaman Modal	Peningkatan Calon Investor	Persentase peningkatan Calon Investor	30%	30%	100%	Pertumbuhaa Calon Investor = (Jumlah calon investor tahun beqjalan dikurang jumlah calon investor tahun lalu) dibagi jumlah calon investor tahun lalu x 100%
			Persentase promosi yang ditindaklanjuti	25%	25%	100%	Promosi yang ditindaklanjuti dibagi jumlah romosl an dilaksanakan x 100%
		Teridentifikasinya Promosi Investasi	Jumlah Item Media Promosi Investasi	6 item	6 item	100%	Jumlah Media Promosi Investasi
			Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Seminar Bisnis, Forum dan One on One Meeting	3 kali	3 Kali	100%	Jumlah Pelaksanaan kegiatan promosi
		Terlaksananya Promosi Investasi	Persentase Potensi Investasi Daerah yang diminati	50%	50%	100%	Persentase Potensi Investasi yang diminati
			Jumlah Pelaksanaan Promosi Investasi	3 Kali	3 Kali	100%	Jumlah Pelaksanaan Promosi Investasi
		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase Permasalahan Perusahaan yang terselesaikan	100%	-	-	Jumlah penyelesaian permasalahan perusahaan dibagi jumlah permasalahan perusahaan x 100%
			Persentase Perusahaan yang Aktif dalam Investasinya	23%	35%	100%	Jumlah Perusahaan yang aktif (diawasi/diamati/diketahui) dibagi jumlah Perusahaan Penanaman Modal yang ada di Kalsel x 100%
7	Kabid Pengendalian dan Informasi PM						

NO	Nama Jabatan	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN	CARA MENGHITUNG INDIKATOR KINERJA
			Persentase Kabupaten/Kota yang mencapai target	55%	38,46%	69,93%	Jumlah Kabupaten/Kota yang Investasi Provinsi dibagi 13 Memenuhi Target Kabupaten/Kota x 100%
		Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Perusahaan PM yang lancar melaksanakan kegiatannya (sesuai target investasi perusahaan)	300 Perusahaan	295 Perusahaan	98,33%	Jumlah Perusahaan Penanaman Modal PMA dan PMDN yang melaksanakan kegiatannya sesuai target Perusahaan
			Laporan Realisasi Penanaman Modal	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	Laporan Realisasi Penanaman Modal
		Pembinaan Penanaman Modal	Jumlah Perusahaan yang menyampaikan LKPM dengan valid tepat waktu	400 Perusahaan	397 Perusahaan	99,25%	Jumlah Perusahaan yang menyampaikan LKPM dengan valid dan tepat waktu
			Persentase Kabupaten/Kota yang telah mengimplementasikan Kebijakan penanaman Modal terbaru	100%	-	-	Jumlah Kabupaten/Kota yang Telah Mengimplementasikan Kebijakan Penanaman Modal Terbaru dibagi 13 (Kabupaten/Kota) x 100%
8	Kabid Perizinan Ekonomi dan Sumber Daya Alam	Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam	Nilai IKM Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam	A (88.50)	A (94)	106,21%	Nilai IKM Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam
			Persentase Permohonan yang dilayani	100%	100%	100%	Jumlah Perizinan Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam yang dilayani dibagi Jumlah Perizinan yang dimohonkan masyarakat x 100%
			Persentase Usaha Berizin	90%	99,88%	110,98%	Jumlah Usaha Berizin dibagi jumlah usaha x 100%
		Pelayanan Perizinan Bidang Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam	Persentase Pemenuhan Pelayanan (Dokumen Permohonan) Perizinan dan Non Perizinan Bidang Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam yang dapat diproses	100%	100%	100%	Jumlah Perizinan Bidang Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam yang dapat diproses sesuai standar dibagi Jumlah Perizinan yang dimohonkan masyarakat x 100%
			Jumlah Jenis Layanan Perizinan dan Non Perizinan Bidang Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam yang dilayani	90 Jenis Izin	90 Jenis Izin	100%	Jumlah Jenis Layanan Perizinan dan Nonperizinan Bidang Lingkungan Hidup dan Sumberdaya Alam yang dilayani dibagi Jumlah Perizinan Bidang Ekonomi yang dapat diproses sesuai standar dibagi Jumlah Perizinan yang dimohonkan masyarakat x 100%

NO	Nama Jabatan	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN	CARA MENGHITUNG INDIKATOR KINERJA
9	Kabid Perizinan Infrastruktur dan Sosial	Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan Bidang Infrastruktur dan Sosial	Nilai IKM Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Bidang Infrastruktur dan Sosial	A (88.50)	A (93,75)	105,93%	Nilai IKM Bidang Infrastruktur dan Sosial
			Persentase Permohonan yang dilayani	100%	100%	100%	Jumlah Perizinan Bidang Infrastruktur dan Sosial sesuai SOP dibagi Jumlah Perizinan yang dimohonkan masyarakat x 100%
			Persentase Usaha Berizin	90%	99,19%	110,21%	Jumlah Usaha Berizin dibagi jumlah usaha x 100%
		Peningkatan Pelayanan Perizinan Bidang Sosial	Persentase Pemenuhan Pelayanan (Dokumen Permohonan) Perizinan dan Non Perizinan Bidang Sosial yang dapat diproses sesuai standar pelayanan	100%	100%	100%	Jumlah Perizinan Bidang Sosial yang dapat diproses sesuai standar dibagi Jumlah Perizinan yang dimohonkan masyarakat x 100%
			Jumlah Jenis Layanan Perizinan dan Non Perizinan Bidang Sosial yang dilayani	55 Jenis Izin	55 Jenis Izin	100,00%	Jumlah Jenis Layanan Perizinan dan Nonperizinan Bidang Sosial yang dilayani
10	Kabid Pengaduan, kebijakan dan Informasi	Pelayanan, Pengaduan, Kebijakan dan Informasi	Nilai IKM penanganan (pelayanan) Pengaduan	A (88.50)	A (94.70)	107.01%	Nilai IKM penanganan (pelayanan) Pengaduan
		Pelayanan Data dan Sistem Informasi	Jumlah Sistem Informasi yang Berjalan dengan Lancar dan Data Informasi yang Update	3 Sistem	3 Sistem	100%	Jumlah Sistem Informasi yang Berjalan dengan Lancar dan Data Informasi yang Update (terbaru)
		Pelayanan Pengaduan	Persentase Pengaduan yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	Jumlah Pengaduan yang ditindaklanjuti dibagi jumlah pengaduan x 100%
			Persentase Pemenuhan pelayanan Investor	100%	100%	100%	Jumlah Pelayanan Investor dibagi Jumlah Permintaan Calon Investor x 100 %
			Persentase Pemenuhan Pelayanan Konsultasi	100%	100%	100%	Jumlah Pemenuhan Layanan Konsultasi dibagi Jumlah Konsultasi (dari Masyarakat/Pemohon Ijin) x 100%

IV. Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran Sebelumnya

Pada anggaran tahun sebelumnya tidak ada rekomendasi yang harus ditindak lanjuti.

NO	SKPD	PERMASALAHAN	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT SKPD	PERMASALAHAN / HAMBATAN	PENYELESAIAN MASALAH
3	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		a. Kebijakan Investasi diarahkan tidak hanya pada sektor padat modal melainkan juga pada sektor padat karya. Pemerintah daerah perlu mengembangkan sektor pertanian, perdagangan, dan industri karena berdasarkan hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus 2023, sektor-sektor tersebut menyerap tenaga kerja paling banyak b. perlu menyediakan informasi potensi daerah yang dapat diakses dengan lebih mudah dan melakukan komunikasi masif kepada calon calon investor untuk meningkatkan nilai jual terhadap potensi yang dimiliki daerah. segera menyusun Raperda tentang Kemudahan Investasi, dalam rangka memberikan kemudahan dan jaminan bagi calon investor dan payung hukum bagi pemerintah daerah.	a. Mengembangkan potensi investasi sektor perkebunan, peternakan dan tanaman pangan dengan melakukan koordinasi dengan DPMPTSP Kab/Kota se-Kalsel. b. Melakukan kajian potensi investasi sektor investasi sektor perkebunan, peternakan dan tanaman pangan 1. DPMPTSP sudah menyiapkan beberapa informasi potensi investasi berupa web dgn nama BEKANTAN, investment project ready to offer (IPRO) dan green desain investasi sehingga memudahkan para calon investor untuk mendapatkan informasi yg diperlukan dengan data yang selengkap mungkin.	1. b. Kurangnya data potensi investasi yang di dapat dari kabupaten/kota sehingga minimnya data di unggah kedalam web BEKANTAN dan Green desain	1.

BAB II

CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN DEKONSENTRASI

1. Dasar Hukum Pelaksanaan Dana Dekonsentrasi
 - A. Tugas Pembantuan Pusat yang Dilaksanakan oleh Daerah Provinsi (Dekonsentrasi)
 - a. Peraturan Menteri Investasi/BKPM Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pelimpahan dan Pedoman Penyelenggaraan Dekonsentrasi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
 - b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Lingkup Kementerian Dalam Negeri
 - c. DIPA Tahun Anggaran 2025 Nomor SP DIPA Nomor 010.04.3.484172/2024 Tanggal 24 November 2023 Program Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa
 - d. DIPA Tahun Anggaran 2024 Nomor SP DIPA 065.01.3.159002/2024 Tanggal 14 Maret 2024 Program Penanaman Modal Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
 - B. Dana Dekonsentrasi Pusat yang Dilaksanakan oleh Daerah Provinsi DAK Fisik dan Non Fisik (APBN DAK)
 - a. Peraturan Menteri Investasi / Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Pertunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Fasilitas Penanaman Modal Tahun Anggaran 2022.
2. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan
 - A. Dana Dekonsentrasi Pusat yang Dilaksanakan oleh Daerah Provinsi (Dekonsentrasi)
 - a. Kementerian Investasi / BKPM RI
 - b. Kementerian Dalam Negeri
 - B. Dana Dekonsentrasi Pusat yang Dilaksanakan oleh Daerah Provinsi DAK Fisik dan Non Fisik (APBN DAK)
 - a. Kementerian Investasi / BKPM RI

3. Realisasi Program dan Kegiatan Beserta Anggaran :
 1. Dana Dekonsentrasi Pusat yang Dilaksanakan oleh Daerah Provinsi (Dekonsentrasi)
 - a. Program dan Kegiatan
 - b. Program Penanaman Modal, Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Wilayah IV
 - c. Program Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa, Kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerja sama Daerah.

Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2024

URAIAN	Kementerian Investasi / BKPM			Kementerian Dalam Negeri		
	Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%
Belanja Barang	322.874.000	214.791.180	66.52	51.088.000	35.861.000	70.19
Total Belanja Kotor	322.874.000	214.791.180	66.52	51.088.000	35.861.000	70.19
Pengembalian Belanja	0	0	0	0	0	0
Jumlah	322.874.000	214.791.180	66.52	51.088.000	35.861.000	70.19

Pada Tahun 2024 DPMPTSP Provinsi Kalimantan Selatan mendapatkan alokasi Dana Dekonsentrasi yang berasal dari Kementerian Investasi/BKPM dan Kementerian Dalam Negeri. Untuk Dana Dekonsentrasi dari Kementerian Investasi/BKPM dengan Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Wilayah IV bertujuan untuk melakukan pemantauan perkembangan realisasi investasi pada proyek-proyek PMA/PMDN di Kalimantan Selatan. Dari 28 Proyek PMA/PMDN yang ditargetkan oleh Kementerian Investasi/BKPM, telah terpantau sebanyak 21 Proyek PMA/PMDN atau tercapai 75%. Sedangkan Dana Dekonsentrasi dari Kementerian Dalam Negeri dengan Kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerja sama Daerah bertujuan untuk memastikan melaksanakan tugas dan wewenang gubernur sebagai wakil pemerintah pusat berkinerja baik. Dari target capaian output oleh Kementerian Dalam Negeri, telah tercapai 1 (satu) rekomendasi kebijakan atau telah tercapai 100%.

4. Tugas Pembantuan Pusat yang Dilaksanakan oleh Daerah Provinsi DAK Fisik dan Non Fisik (APBN DAK)
 - a. Jenis DAK Non Fisik, Kegiatan Pengawasan Penanaman Modal.
 - b. Jenis DAK Non Fisik, Kegiatan Bimbingan Teknis Kepada Pelaku Usaha.
 - c. Jenis DAK Non Fisik, Kegiatan Penyelesaian Masalah dan Hambatan Pelaku Usaha.
 - d. Jenis DAK Non Fisik, Kegiatan Penyusunan Peta Potensi.

Realisasi Belanja APBN (DAK) Fisik dan Nonfisik instansi pada TA 2024

adalah sebesar :

- a. Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal dengan realisasi sebesar Rp 160.826.500 atau 82.89 persen dengan anggaran belanja sebesar Rp 194.023.000 dengan realisasi fisik 100 persen
- b. Bimbingan Teknis Kepada Pelaku Usaha dengan realisasi sebesar Rp 299.312.000 atau 86.64 persen dari anggaran belanja sebesar Rp 345.459.000 dengan realisasi fisik 100 persen
- c. Penyelesaian Masalah dan Hambatan Pelaku Usaha dengan realisasi sebesar Rp 23.224.400 atau 28.52 persen dari anggaran belanja sebesar Rp 81.432.000 dengan realisasi fisik 100 persen.
- d. Penyusunan Peta Potensi dengan realisasi sebesar Rp 250.000.000 atau 100 persen dari anggaran belanja sebesar Rp 250.000.000 dengan realisasi fisik 100 persen.

Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase %
Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	194.023.000	160.826.000	82.89%
Bimbingan Teknis Kepada Pelaku Usaha	345.459.000	299.312.000	86.64%
Penyelesaian Masalah dan Hambatan Pelaku Usaha	81.432.000	23.224.400	28.52%
Penyusunan Peta Potensi	250.000.000	250.000.000	100%

5. Permasalahan dan Kendala
 - A. Koordinasi dan Sinkronisasi pengawasan pelaksanaan penanaman modal
 1. Tidak adanya DAK Perubahan
 - B. Koordinasi dan Sinkronisasi pembinaan pelaksanaan penanaman modal
 1. Perubahan pejabat perbendaharaan
 - C. Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Promosi
 1. Belum adanya project ready to offer (IPRO) untuk potensi yang akan ditawarkan
 2. Minimnya anggaran Kab/Kota untuk menyiapkan anggaran kajian IPRO
6. Saran dan Tindak Lanjut :
 - A. Menyiapkan anggaran untuk penyusunan kajian IPRO
 - B. Melakukan sosialisasi LKPM di Kab/Kota agar pelaku usaha dapat dibantu dalam penginputan sehingga terpenuhinya target laporan LKPM

BAB III

CAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

1. Jenis Pelayanan Dasar

Berdasarkan Surat Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 610/9803/Bangda tanggal 20 Desember 2017 tentang pelaporan capaian penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM), dimana tidak terdapat SPM pada urusan Penanaman Modal pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

2. Alokasi dan Realisasi Anggaran

2.1 Alokasi

Alokasi anggaran pada DPMPTSP Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2024 sebesar Rp. 23.024.119.987 (100%) sedangkan realisasi anggaran sebesar Rp. 20.431.088.166 (88.73%). Sedangkan realisasi fisik berupa output kegiatan sebesar 100%.

2.2 Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran Belanja Langsung DPMPTSP Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024 disajikan pada tabel berikut :

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Anggaran	Bobot	Realisasi S/D Desember							
		Sub Output	Satuan Unit			Fisik		Keuangan		Pagu Realisasi		Satuan unit	
						S	R	S	R	S	R		
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAHPROVINSI			13.087.756.472	72.82	100	100	100	88.73	13.087.756.472	12.991.698.085		
X.XX.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja PerangkatDaerah			946.252.200	4.02	100	100	100	82.04	946.252.200	776.320.115		
X.XX.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	645.570.700	2.78	100	100	100	90.62	645.570.700	585.044.455	2 Dokumen	
X.XX.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	300.681.500	1.29	100	100	100	63.61	300.681.500	191.275.660	3 Dokumen	
X.XX.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			7.533.905.100	32.41	100	100	100	94.59	7.533.905.100	7.126.809.009		
X.XX.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 Bulan	7.231.086.700	31.1	100	100	100	95.84	7.231.086.700	6.930.465.060	14 Bulan	
X.XX.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan TugasASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan AdministrasiPelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	148.008.100	0.64	100	100	100	90.58	148.008.100	134.061.200	1 Dokumen	
X.XX.01.1.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen	154.810.300	0.67	100	100	100	40.23	154.810.300	62.282.749	1 Dokumen	
X.XX.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			898.614.000	3.87	100	100	100	87.24	898.614.000	783.880.232		
X.XX.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	77 Paket	84.000.000	0.36	100	100	100	97.96	84.000.000	82.290.000	77 Paket	

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Anggaran	Bobot	Realisasi S/D Desember							
		Sub Output	Satuan Unit			Fisik		Keuangan		Pagu Realisasi		Satuan unit	
						S	R	S	R	S	R		
X.XX.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Peningkatan Kompetensi ASN	46 Orang	761.622.000	3.28	100	100	100	88.12	761.622.000	671.109.232	46 Orang	
X.XX.01.1.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	200 Orang	21.401.000	0.09	100	100	100	31.84	21.401.000	6.815.000	150 Orang	
X.XX.01.1.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi PeraturanPerundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	3 Orang	31.591.000	0.14	100	100	100	74.91	31.591.000	23.666.000	3 Orang	
X.XX.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			1.121.871.100	4.83	100	100	100	80.34	1.121.871.100	901.341.784		
X.XX.01.1.06.01	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Bulan	63.768.500	0.27	100	100	100	87.74	63.768.500	55.947.500	12 Bulan	
X.XX.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	163.698.700	0.7	100	100	100	93.8	163.698.700	153.555.300	12 Paket	
X.XX.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Bulan	20.654.900	0.09	100	100	100	75.04	20.654.900	15.500.000	12 Bulan	
X.XX.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	55.614.000	0.24	100	100	100	83.57	55.614.000	46.474.000	12 Paket	
X.XX.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan PerundangUndangan yang Disediakan	12 Paket	139.512.000	0.6	100	100	100	98.2	139.512.000	137.005.800	12 Paket	
X.XX.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	678.623.000	2.92	100	100	100	72.63	678.623.000	492.859.184	12 Laporan	
X.XX.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			1.608.450.000	6.92	100	100	100	62.01	1.608.450.000	997.400.000		
X.XX.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	27 Buah	156.300.000	0.67	100	100	100	97.31	156.300.000	152.100.000	27 Buah	
X.XX.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	41 Unit	1.452.150.000	6.25	100	100	100	58.21	1.452.150.000	845.300.000	39 Unit	
X.XX.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1.109.512.272	4.77	100	100	100	85.45	1.109.512.272	948.133.023		
X.XX.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	15.935.000	0.07	100	100	100	84.72	15.935.000	13.500.000	12 Laporan	
X.XX.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	497.500.000	2.14	100	100	100	72.49	497.500.000	360.652.223	12 Laporan	
X.XX.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	596.077.272	2.56	100	100	100	96.29	596.077.272	573.980.800	12 Laporan	
X.XX.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1.524.488.415	6.56	100	100	100	96.13	1.524.488.415	1.465.402.017		
X.XX.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	24 Unit	638.652.000	2.75	100	100	100	99.86	638.652.000	637.735.345	24 Unit	

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Anggaran	Bobot	Realisasi S/D Desember							
		Sub Output	Satuan Unit			Fisik		Keuangan		Pagu Realisasi		Satuan unit	
						S	R	S	R	S	R		
X.XX.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	669.506.415	2.88	100	100	100	96.91	669.506.415	648.836.672	1 Unit	
X.XX.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	12 Paket	216.330.000	0.93	100	100	100	82.67	216.330.000	178.830.000	12 Paket	
X.XX.01.1.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah			0	0	100	NAN	100	NAN	0	0	0	
X.XX.01.1.11.02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	0 Stell	0	0	0	100	0	0	0	0	0 Stell	
2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL			1.525.924.600	6.56	100	100	100	87.59	1.525.924.600	1.336.565.580		
2.18.02.1.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi			437.149.100	1.88	100	100	100	70.83	437.149.100	309.624.680		
2.18.02.1.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi Dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	1 Dokumen	304.944.800	1.31	100	100	100	81.77	304.944.800	249.349.680	1 Dokumen	
2.18.02.1.01.03	Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi	Jumlah Kemitraaan Dunia Usaha	4 Kemitraan	132.204.300	0.57	100	100	100	45.59	132.204.300	60.275.000	4 Kemitraan	
2.18.02.1.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi			1.088.775.500	4.68	100	100	100	94.32	1.088.775.500	1.026.940.900		
2.18.02.1.02.03	Pemutakhiran data potensi investasi daerah pada Sistem PIR (Potensi Investasi Regional)	Jumlah daerah yang telah dilaksanakan pemutakhiran data potensi investasi	1 Dokumen	127.923.300	0.55	100	100	100	52.01	127.923.300	66.535.000	1 Dokumen	
2.18.02.1.02.05	Penyusunan Peta Potensi Investasi Provinsi	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Provinsi	4 Dokumen	960.852.200	4.13	100	100	100	99.95	960.852.200	960.405.900	4 Dokumen	
2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	2.488.023.400	10.7	2.488.023.400	10.7	100	100	100	87.75	2.488.023.400	2.183.260.700		
2.18.03.1.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provins			2.488.023.400	10.7	100	100	100	87.75	2.488.023.400	2.183.260.700		
2.18.03.1.01.02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	Jumlah Pelaksanaan promosi investasi	3 Kali	1.996.309.400	8.59	100	100	100	98.32	1.996.309.400	1.962.680.100	3 Kali	
2.18.03.1.01.03	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	Jumlah Item Media Promosi	5 Item	266.857.000	1.15	100	100	100	82.66	266.857.000	220.580.600	5 Item	
2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL			2.248.573.200	9.67	100	100	100	86.82	2.248.573.200	1.952.152.74		
2.18.04.1.02	Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi			2.248.573.200	9.67	100	100	100	86.82	2.248.573.200	1.952.152.749		
2.18.04.1.02.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Provinsi	1 Dokumen	1.108.456.800	4.77	100	100	100	78.05	1.108.456.800	865.099.709	1 Dokumen	
2.18.04.1.02.07	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Tersedianya Pelayanan Perizinan Berusaha	10 Pelaku Usaha	941.733.400	4.05	100	100	100	96.87	941.733.400	912.233.740	10 Pelaku Usaha	

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Anggaran	Bobot	Realisasi S/D Desember							
		Sub Output	Satuan Unit			Fisik		Keuangan		Pagu Realisasi		Satuan unit	
						S	R	S	R	S	R		
2.18.04.1.02.08	Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Pelayanan Konsultasi	30 Orang	198.383.000	0.85	100	100	100	88.12	198.383.000	174.819.300	30 Orang	
2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL			1.169.494.700	5.03	100	100	100	83.8	1.169.494.700	979.978.350		
2.18.05.1.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi			1.169.494.700	5.03	100	100	100	83.8	1.169.494.700	979.978.350		
2.18.05.1.01.04	Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dllakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dllakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	6 Kegiatan usaha	641.977.100	2.76	100	100	100	92.29	641.977.100	592.463.050	6 Kegiatan usaha	
2.18.05.1.01.05	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	6 Pelaku Usaha	110.127.600	0.47	100	100	100	45.04	110.127.600	49.598.050	6 Pelaku Usaha	
2.18.05.1.01.06	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	6 Pelaku Usaha	417.390.000	1.8	100	100	100	80.96	417.390.000	337.917.250	6 Pelaku Usaha	
2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL			1.073.868.000	4.62	100	100	100	90.41	1.073.868.000	970.844.607		
2.18.06.1.01	Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi			1.073.868.000	4.62	100	100	100	90.41	1.073.868.000	970.844.607		
2.18.06.1.01.02	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Aplikasi/Sistem Informasi	3 Aplikasi	1.073.868.000	4.62	100	100	100	90.41	1.073.868.000	970.844.607	3 Aplikasi	
Total				23.024.119.987	100	100	100	100	88.73	23.024.119.987	20.423.500.766		

3. Dukungan Personil

Untuk memberikan gambaran yang jelas terhadap susunan kepegawaian yang dimiliki DPMPTSP Provinsi Kalimantan Selatan guna menunjang tugas dan fungsinya saat ini sebagai berikut :

Sumberdaya manusia pada DPMPTSP Provinsi Kalimantan Selatan diklasifikasikan kedalam jenjang minimal SD atau Sekolah Dasar dan jenjang paling puncak yaitu jenjang Serjana S2. Komposisi pegawai berdasarkan kualifikasi pendidikan dapat dilihat di tabel.

Komposisi Pegawai Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan

No	Kualifikasi Pendidikan	Jumlah		Total	Ket
		L	P		
1	2	3	4	5	6
1	Sekolah Dasar (SD)	-	-	-	
2	Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP)	-	-	-	
3	Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA)	4	-	4	
4	Diploma Satu (D-I)	-	-	-	
5	Diploma Dua (D-II)	-	-	-	
6	Diploma Tiga (D-III)	2	2	4	
7	Diploma Empat (D-IV)	-	-	-	
8	Sarjana (S-1)	11	8	19	
9	Sarjana (S-2)	6	3	9	
10	Sarjana (S-3)	1	-	1	
	Jumlah ASN	24	13	37	
1	Sekolah Dasar (SD)	3	-	3	*)
2	Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP)	2	-	2	*)
3	Sekolah Menengah Atas (SMA)	12	3	15	*)
4	Diploma III (D3)	1	2	3	*)
5	Sarjana (S-1)	14	12	26	*)
	Jumlah Non PNS	32	17	49	
	Jumlah Seluruh Karyawan DPMPTSP	55	26	81	

Keterangan : *) Pegawai Tenaga Kontrak

Dari jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak 81 (delapan puluh satu) orang kemudian ditentukan komposisi pegawai berdasarkan pangkat golongan sebagaimana tercantum pada tabel berikut:

Komposisi Pegawai Sipil Negara (PNS) Berdasarkan Pangkat Golongan

No	Pangkat dan Golongan	Jumlah		Total	Ket
		L	P		
1	2	3	4	5	6
1	II/a Pengatur Muda	-	-	-	
2	II/b Pengatur Muda Tk.I	-	-	-	
3	II/c Pengatur	1	2	3	
4	II/d Pengatur Tk.I	1	-	1	
5	III/a Penata Muda	4	2	6	
6	III/b Penata Muda Tk.I	-	2	2	
7	III/c Penata	4	-	4	
8	III/d Penata Tk.I	5	5	10	
9	IV/a Pembina	5	2	7	
10	IV/b Pembina Tk.I	2	-	2	
11	IV/c Pembina Utama Tk.I	1	-	1	
12	IV/d Pembina Utama	-	-	-	

No	Pangkat dan Golongan	Jumlah		Total	Ket
		L	P		
1	2	3	4	5	6
13	PPPK	1	-	1	
	JUMLAH	24	13	37	

Komposisi pegawai berdasarkan jabatan struktural dan fungsional untuk menentukan seberapa besar tanggung jawab yang diemban Pegawai Negeri Sipil (PNS) dapat dilihat pada tabel.

Komposisi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Berdasarkan Jabatan Struktural dan Fungsional

No	Struktural dan Fungsional	Jumlah		Total	Ket
		L	P		
1	2	3	4	5	
1	Eselon I	-	-	-	
2	Eselon II.A	1	-	1	
3	Eselon III.A	5	2	7	
4	Eselon IV.A	2	-	2	
5	Fungsional Tertentu	7	2	9	
6	Non Struktural / Fungsional Umum	8	9	17	
7	PPPK	1	-	1	
	Jumlah	24	13	37	

4. Permasalahan dan Solusi

4.1 Permasalahan

Tingginya satuan harga pada DPA yang merupakan implelementasi perpres 33 pada SIPD, sehingga anggaran belanja besar. Realisasi belanja relative rendah, tetapi realisasi fisik terpenuhi. Sehingga terdapat SILPA pada anggaran tahun 2023.

4.2 Solusi

Koordinasi dengan TAPD terkait pengalokasian anggaran. Kalimantan Selatan termasuk daerah yang relatif aman dan kondusif sebagai tempat berinvestasi sekalipun ada beberapa permasalahan yang memerlukan penyelesaian yang arif dan bijaksana.

BAB IV

TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD

NO	SKPD	PERMASALAHAN	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT SKPD	PERMASALAHAN / HAMBATAN	PENYELESAIAN MASALAH
3	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		c. Kebijakan Investasi diarahkan tidak hanya pada sektor padat modal melainkan juga pada sektor padat karya. Pemerintah daerah perlu mengembangkan sektor pertanian, perdagangan, dan industri karena berdasarkan hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus 2023, sektor-sektor tersebut menyerap tenaga kerja paling banyak d. perlu menyediakan informasi potensi daerah yang dapat diakses dengan lebih mudah dan melakukan komunikasi masif kepada calon calon investor untuk meningkatkan nilai jual terhadap potensi yang dimiliki daerah. segera menyusun Raperda tentang Kemudahan Investasi, dalam rangka memberikan kemudahan dan jaminan bagi calon investor dan payung hukum bagi pemerintah daerah.	c. Mengembangkan potensi potensi investasi sektor perkebunan, peternakan dan tanaman pangan dengan melakukan koordinasi dengan DPMPTSP Kab/Kota se-Kalsel. d. Melakukan kajian potensi investasi sektor investasi sektor perkebunan, peternakan dan tanaman pangan 2. DPMPTSP sudah menyiapkan beberapa informasi potensi investasi berupa web dgn nama BEKANTAN, investment project ready to offer (IPRO) dan green desain investasi sehingga memudahkan para calon investor untuk mendapatkan informasi yg diperlukan dengan data yang selengkap mungkin.	2. b. Kurangnya data potensi investasi yang di dapat dari kabupaten/kota sehingga minimnya data di unggah kedalam web BEKANTAN dan Green desain	2. Pembuatan Web Investasi Kalimantan Selatan Bekantan dan Green Desain

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Kalimantan Selatan sebagai instansi teknis yang melayani kegiatan Promosi, selalu berusaha untuk memanfaatkan sumber dana dan sarana yang ada dengan baik, dan berusaha melaksanakan tugas seoptimal mungkin dengan memperhatikan point-point yang dipaparkan sebelumnya, tingkat keberhasilan pencapaian pelaksanaan tugas DPMPTSP Provinsi Kalimantan Selatan secara umum dapat dikatakan berhasil, karena target yang ada dapat dicapai dengan baik.

Penyusunan LKPJ LPPD DPMPTSP Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023 adalah dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang akuntabel, artinya telah melaksanakan kinerja berdasarkan Rencana Strategik yang di dalamnya berisi sasaran-sasaran stratejik yang harus dipertanggung jawabkan. Sasaran stratejik tersebut merupakan gambaran tentang apa yang ingin dicapai oleh instansi pada tahun 2023 dan dituangkan dalam dokumen Perencanaan Kinerja Tahun 2023. Dengan demikian di dalam LKPJ LPPD Tahun 2023 ini DPMPTSP Provinsi Kalimantan Selatan telah berusaha menjawab dan membuktikan bahwa amanah yang diberikan kepada instansi dapat dipertanggung jawabkan.

Dapat disimpulkan DPMPTSP Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2023 dengan 2 (dua) indikator kinerja utama yaitu realisasi investasi dan indeks kepuasan masyarakat (IKM). Adapun capaian realisasi investasi sebesar Rp 24.85T, sedangkan capaian nilai IKM A(94.25). Dapat disimpulkan capaian kinerja DPMPTSP Provinsi Kalimantan Selatan dengan klarifikasi sangat memuaskan.

LAMPIRAN